

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
INTISARI	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Kontribusi Penelitian	12
1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	13
1.7 Sistematika Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Definisi Analisis	15
2.2 Konsep dan Ukuran Keefektifan.....	16
2.3 <i>Fraud</i> dan Korupsi.....	18
2.4 Peran Pemerintah Daerah sebagai Agen dalam Lingkup Teori Institusional.....	21
2.5 Sebuah Kerangka Analitikal untuk Program dan Kebijakan Antikorupsi yang Efektif.....	23
2.5.1 Kerangka model <i>Fraud Control Plan</i>	36
2.6 Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Profil Objek Penelitian.....	50
3.2 Rasionalisasi dalam Menentukan Objek Penelitian	54

3.3	Jenis Penelitian	58
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	59
3.4.1	Data primer	59
3.4.2	Data sekunder	60
3.5	Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.6	Metode dan Teknik Analisis Data	62
3.7	Pengembangan Definisi Operasional Standar Ukuran Keefektifan. .63	
3.8	Validitas dan Reliabilitas	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		69
4.1	Keefektifan Upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi	69
4.1.1	Kebijakan makro terintegrasi (<i>integrated macro policy</i>)	69
4.1.2	Strategi pencegahan korupsi	85
4.1.2.1	Struktur pertanggungjawaban (<i>responsibility structure</i>)	85
4.1.2.2	Penilaian risiko korupsi (<i>fraud risk assessment</i>)	94
4.1.2.3	Kesadaran pegawai (<i>employee awareness</i>)	99
4.1.2.4	Kepedulian pelanggan dan masyarakat (<i>customer and community awareness</i>)	104
4.1.2.5	Standar perilaku dan disiplin (<i>conduct and disciplinary standard</i>)	114
4.1.3	Strategi pendeteksian korupsi	120
4.1.3.1	Sistem pelaporan korupsi (<i>fraud reporting system</i>)	120
4.1.3.2	Perlindungan pelapor (<i>whistleblowing policy</i>)	128
4.1.4	Strategi penindakan korupsi	132
4.1.4.1	Pemberitahuan pihak luar (<i>external notification</i>)	132
4.1.4.2	Standar investigasi (<i>investigation standard</i>).....	134
4.2	Rekomendasi Aplikatif untuk Pengembangan Praktik Manajemen Berdasarkan Model <i>Fraud Control Plan</i>	141
4.2.1	Kebijakan makro terintegrasi (<i>integrated macro policy</i>).....	141
4.2.2	Strategi pencegahan korupsi	145
4.2.2.1	Struktur pertanggungjawaban (<i>responsibility structure</i>)	145
4.2.2.2	Penilaian risiko korupsi (<i>fraud risk assessment</i>)	147
4.2.2.3	Kepedulian pegawai (<i>employee awareness</i>).....	149
4.2.2.4	Kepedulian pelanggan dan masyarakat (<i>customer and community Awareness</i>).....	151

4.2.2.5	Standar perilaku dan disiplin (<i>conduct and disciplinary standards</i>)	152
4.2.3	Strategi pendeteksian korupsi	153
4.2.3.1	Sistem pelaporan korupsi (<i>fraud reporting system</i>).....	153
4.2.3.2	Perlindungan pelapor (<i>whistleblower policy</i>)	155
4.2.4	Strategi penindakan korupsi.....	157
4.2.4.1	Notifikasi eksternal (<i>external notification</i>).....	157
4.2.4.2	Standar investigasi (<i>investigation standard</i>).....	158
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....		160
5.1	Simpulan Penelitian	160
5.1.1	Keefektifan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam membangun sistem pengendalian korupsi	161
5.1.2	Rekomendasi aplikatif untuk pengembangan praktik manajemen berdasarkan model <i>Fraud Control Plan</i>	163
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	170
5.3	Implikasi dan Saran	170
5.3.1	Implikasi penelitian.....	170
5.3.2	Saran bagi regulator dan praktisi	171
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sejarah Panjang Upaya Pemerintah Memberantas Korupsi	1
Tabel 1.2	Data TPK Berdasarkan Instansi Periode 2007—2017	3
Tabel 4.1	Hasil Analisis Terhadap Unsur Pengendalian pada Kebijakan Makro Pemerintah Kota Bekasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pendekatan Pemberantasan <i>Fraud</i>	28
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Hubungan Atribut <i>Fraud Control Plan</i> dengan Dimensi Sistem Pengendalian Korupsi	47
Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPM-PTSP Kota Bekasi	53
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bekasi.....	54
Gambar 3.3 <i>Interface</i> Situs Resmi DPM-PTSP Kota Bekasi	56
Gambar 3.4 <i>Banner</i> Zona Integritas pada Ruang Pelayanan DPM-PTSP Kota Bekasi.....	58
Gambar 4.1 Hasil Observasi yang Memperlihatkan Contoh Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengendalian Korupsi Manajemen DPM-PTSP...76	
Gambar 4.2 Hasil Observasi yang Memperlihatkan Aktivitas Salah Satu Petugas URC DPM-PTSP Sedang Menangani Pengaduan Masyarakat.....	88
Gambar 4.3 Uraian Tugas Petugas URC DPM-PTSP	89
Gambar 4.4 Isi Pakta Integritas	90
Gambar 4.5 Piagam ISO 9001 DPM-PTSP	96
Gambar 4.6 Hasil Observasi yang Memperlihatkan Proses Verifikasi Perizinan Secara Manual.....	110
Gambar 4.7 Hasil Observasi yang Memperlihatkan Proses Verifikasi Perizinan melalui SiLAT	110
Gambar 4.8 Hasil Observasi yang Memperlihatkan Ruang Pelayanan DPM-PTSP Sudah Dipasang Banner "NO PUNGLI"	111
Gambar 4.9 Hasil Dokumentasi yang Memperlihatkan Upaya Penyadaran Publik mengenai Program Antikorupsi Pemerintah Kota Bekasi...112	
Gambar 4.10 <i>Interface</i> LPSE Pemerintah Kota Bekasi.....	113
Gambar 4.11 Maklumat DPM-PTSP	117
Gambar 4.12 <i>Interface</i> Pengaduan <i>Online</i> Terpadu (POT) Kota Bekasi	121
Gambar 4.13 <i>Interface Whistleblowing</i> Kota Bekasi	121
Gambar 4.14 Berita Peluncuran WBS Pemerintah Kota Bekasi	123
Gambar 4.15 Hasil Observasi yang Memperlihatkan Pendokumentasian Laporan Pengaduan Masyarakat	125

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi (Instansi: Inspektorat Kota Bekasi)
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi (Instansi: DPM-PTSP Kota Bekasi)
- Lampiran 3 Pertanyaan Kuesioner atas *Employee Awareness*
- Lampiran 4 Pertanyaan Kuesioner atas *Customer and Community Awareness*
- Lampiran 5 *Chain of Evidence* Hasil Coding Program Analisis Atribut Model *Fraud Control Plan*
- Lampiran 6 Atribut *Model Fraud Control Plan*
- Lampiran 7 Surat Keterangan Balai Bahasa Jawa Tengah
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lembaga Bahasa LIA